



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 12A/KEP/BSN/2/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat :
1. Keputusan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
  3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/PER/BSN/7/2006;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.**

**Pasal 1**

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010 - 2014

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2010

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

**BAMBANG SETIADI**

1. Nama Organisasi : Badan Standardisasi Nasional
2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
  - a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
  - b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
  - c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
  - d. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi ;
  - e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber data
1	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar	- Jumlah SNI yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar	database SNI dari Pusat Perumusan Standar
2	Terciptanya budaya standar di masyarakat,	- Jumlah Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Standardisasi	laporan partisipasi masyarakat yang peduli terhadap standardisasi dan anggota MASTAN dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi
		- Jumlah peserta pelatihan standardisasi	laporan pelatihan standardisasi dari Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
		- Jumlah pengunjung perpustakaan	laporan pengunjung yang datang ke perpustakaan dari Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
		- Jumlah akses masyarakat terhadap web BSN	laporan pengakses website dari Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
		- Jumlah permintaan layanan standar	laporan pengunjung perpustakaan dari Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
3	Tersedianya LPK sesuai kebutuhan penerapan SNI	- Jumlah LPK baru yang diakreditasi	database LPK dari Pusat Sistem Penerapan Standar
		- Jumlah LPK yang ruang lingkupnya sesuai dengan SNI	database LPK dari Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
4	Diterapkannya SNI oleh industri/organisasi,	- Jumlah industri/organisasi yang menerapkan SNI	laporan dari Pusat Sistem Penerapan Standar
5	Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan,	- Jumlah sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian	dokumen dari Biro Hukum, Organisasi dan Humas, Laporan dari inspektorat, Laporan keuangan dari Biro Perencanaan, keuangan dan Tata usaha

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL



BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL